
Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Larangan Membeli BBM Menggunakan Jerigen di SPBU Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Abdul Wahab¹ Yusmar Yusuf²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email : abdul.wahab0819@student.unri.ac.id¹ yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id²

Abstract

This research aims to analyze the community's response to the policy prohibiting the purchase of fuel using jerrycans at the gas station in Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This policy was implemented to prevent the hoarding and misuse of subsidized fuel, but it has a significant impact on the activities of palm oil farmers who rely on biosolar fuel. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the majority of the community does not understand the basis of the policy and experiences difficulties in obtaining fuel. This policy has caused unrest and affected the productivity of palm oil farmers. The conclusion of this research is that the lack of socialization has led to negative responses and issues in the policy's implementation.

Keywords: Community Response, Policy, Fuel (BBM), Jerrycan, Palm Oil Farmers



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), menjadi isu krusial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan kelangkaan dan penyelewengan BBM bersubsidi, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi serta memastikan distribusi yang lebih adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai respon di masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Salah satu daerah yang terdampak signifikan adalah Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kebun sawit yang menggunakan transportasi air berupa pompong untuk mengangkut hasil panen mereka. Operasional pompong ini sangat bergantung pada BBM jenis biosolar, dan masyarakat biasanya membeli BBM menggunakan jerigen dengan kapasitas lebih dari 20 liter untuk kebutuhan operasional harian mereka. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, masyarakat Desa Pengalihan mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM untuk operasional pompong. Mereka diwajibkan mengurus surat rekomendasi dari kantor desa yang hanya berlaku sekali dalam sehari dengan batas maksimal 20 liter. Sementara kebutuhan petani seringkali melebihi jumlah tersebut. Dalam kondisi kekurangan BBM, para petani terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menambah beban biaya operasional. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan keresahan karena menambah kompleksitas dalam pengadaan BBM dan memicu persaingan tidak sehat dalam memperoleh BBM.

Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam di masyarakat. Beberapa masyarakat mendukung kebijakan ini sebagai langkah positif untuk menertibkan distribusi BBM dan

mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, sebagian besar masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan, tidak adil, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka, terutama para petani sawit yang sangat bergantung pada BBM untuk operasional ekonomi mereka. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang juga memperburuk situasi, sehingga masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat kebijakan ini secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan larangan membeli BBM menggunakan jerigen di SPBU Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan ini terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari petani sawit di daerah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan larangan membeli BBM menggunakan jerigen di SPBU Desa Pengalihan?, 2. Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap aktivitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pengalihan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika sosial masyarakat terkait kebijakan publik. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang respon masyarakat terhadap kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, terutama yang sangat bergantung pada BBM untuk operasional ekonomi mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara komprehensif melalui uraian dalam bentuk kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan larangan membeli BBM menggunakan jerigen di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sawit dan sangat bergantung pada BBM jenis biosolar untuk operasional pompong. Lokasi ini dipilih karena dampak kebijakan sangat dirasakan oleh masyarakat setempat yang sering menggunakan jerigen untuk membeli BBM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi: Pengamatan langsung di lapangan untuk melihat perilaku masyarakat dalam merespon kebijakan, Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan kepada petani sawit, ketua kelompok tani, dan perangkat desa untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang respon masyarakat terhadap kebijakan, Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder seperti peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, dan berita terkait kebijakan larangan membeli BBM menggunakan jerigen.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu petani kebun sawit yang membeli BBM menggunakan jerigen. Kriteria yang digunakan dalam memilih subjek penelitian adalah: (a) petani yang menggunakan BBM jenis biosolar untuk operasional pompong, dan (b) petani yang pernah mengalami kesulitan dalam membeli BBM akibat kebijakan tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mengambil 6 (enam) subjek sebagai informan utama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari Reduksi Data: Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang respon masyarakat, Penarikan

Kesimpulan/Verifikasi: Setelah data dianalisis dan disajikan, kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari beberapa informan untuk memastikan konsistensi data, Triangulasi Teknik: Menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif respon masyarakat terhadap kebijakan larangan membeli BBM menggunakan jerigen di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Pengalihan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu petani kebun sawit yang membeli BBM menggunakan jerigen. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, beberapa konsep kunci perlu dipahami agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan objek penelitian. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini akan memberikan dasar teoritis dalam menganalisis hasil penelitian. Respon Masyarakat merujuk pada reaksi atau tanggapan individu maupun kelompok terhadap suatu kebijakan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial mereka. Respon ini dapat berupa penerimaan positif yang mencerminkan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan, maupun penolakan yang dapat berujung pada bentuk perlawanan atau ketidakpuasan. Respon masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman, pengalaman, kepentingan, serta dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, meskipun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat yang terdampak langsung.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam berbagai sektor, seperti transportasi, industri, dan pertanian. BBM terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi. BBM bersubsidi diberikan oleh pemerintah dengan harga yang lebih rendah untuk masyarakat tertentu guna mendukung kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam distribusinya, BBM bersubsidi sering kali mengalami penyalahgunaan, seperti penimbunan dan penjualan ilegal, yang berujung pada kebijakan pengendalian distribusi oleh pemerintah. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah fasilitas yang menyediakan layanan pengisian BBM untuk kendaraan bermotor maupun alat transportasi lainnya. SPBU berperan penting dalam distribusi energi kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, SPBU menjadi fokus utama kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen, di mana kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Identitas Informan

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan fokus pada petani sawit yang terdampak oleh kebijakan larangan pembelian BBM

menggunakan jerigen. Informan dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang sehari-hari bergantung pada BBM jenis solar untuk keperluan operasional alat transportasi air seperti pompong, yang digunakan dalam mengangkut hasil panen sawit mereka ke pasar atau tempat penjualan. Beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Pak Amat, seorang petani sawit yang mengandalkan BBM untuk keperluan angkutan hasil panennya. Selain itu, ada juga Aris yang merupakan warga Parit 5 Sungai Pengalihan, yang sebelumnya menggunakan jerigen dalam membeli solar sebelum kebijakan ini diberlakukan. Informan lainnya, seperti Badek dan Cerik, juga mengalami dampak langsung dari kebijakan ini. Mereka awalnya dapat membeli solar dalam jumlah yang mencukupi, namun setelah diberlakukan larangan penggunaan jerigen, mereka harus menghadapi kesulitan dalam memperoleh BBM. Informan lainnya, seperti Sugik, Aan, Samsudin, Sugito, Satria, dan Kamaruddin, juga merupakan petani sawit yang menghadapi kendala serupa akibat kebijakan ini.

Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Larangan Membeli BBM Menggunakan Jerigen

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini bervariasi, dengan sebagian besar petani sawit merasa kebijakan ini memberikan tantangan tambahan dalam menjalankan kegiatan pertanian mereka. Banyak masyarakat yang awalnya tidak mengetahui adanya kebijakan ini hingga mereka dilarang membeli BBM di SPBU menggunakan jerigen. Hal ini mengakibatkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan petani, terutama karena tidak ada sosialisasi yang cukup dari pihak pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan ini karena mereka harus mengurus surat rekomendasi dari kantor desa untuk dapat membeli BBM menggunakan jerigen. Namun, proses ini dianggap rumit dan hanya berlaku selama satu bulan, sehingga mereka harus terus mengurus perizinan setiap bulan. Akibatnya, banyak petani yang memilih untuk tidak mengurus surat rekomendasi dan malah membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Menurut teori anomie dari Robert K. Merton, situasi ini mencerminkan kondisi masyarakat yang mengalami ketidakseimbangan antara tujuan dan sarana yang tersedia. Para petani sawit memiliki kebutuhan yang jelas akan BBM untuk transportasi hasil panennya, tetapi dengan diberlakukannya kebijakan ini, mereka kehilangan akses mudah terhadap bahan bakar tersebut. Akibatnya, beberapa dari mereka memilih jalan alternatif, seperti membeli BBM secara ilegal atau melalui pengecer yang menjual dengan harga lebih tinggi.

Dampak yang Dirasakan Masyarakat Petani Sawit terhadap Kebijakan Larangan Ini

Dampak dari kebijakan ini dapat dikategorikan dalam dua aspek utama, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Dari segi sosial, kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi petani sawit yang sehari-harinya bergantung pada BBM sebagai sumber energi utama dalam menjalankan usaha mereka. Banyak dari mereka merasa kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menetapkan regulasi BBM mengalami penurunan. Dari segi ekonomi, kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga BBM di pasar gelap karena banyak petani yang terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga resmi di SPBU. Hal ini secara langsung meningkatkan biaya operasional mereka, yang berdampak pada keuntungan yang mereka peroleh dari hasil panen sawit. Beberapa petani bahkan terpaksa mengurangi frekuensi panen karena keterbatasan BBM, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat, khususnya petani sawit di Desa Pengalihan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol distribusi BBM dan mencegah penyalahgunaan

subsidi, namun dalam implementasinya kebijakan ini justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan solusi yang lebih baik agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada BBM sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk aktivitas pertanian dan transportasi hasil panen mereka. Masyarakat Desa Pengalihan pada umumnya tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai kebijakan ini, sehingga banyak dari mereka yang terkejut ketika kebijakan mulai diterapkan. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebingungan dan protes dari masyarakat, terutama karena mereka merasa kebijakan ini memperumit akses mereka terhadap BBM. Pada awal penerapan, masyarakat cenderung mencoba mengikuti aturan dengan membuat surat rekomendasi dari kantor desa agar tetap dapat membeli BBM menggunakan jerigen. Namun, seiring waktu, banyak masyarakat yang merasa bahwa prosedur administrasi yang diberlakukan terlalu rumit dan tidak praktis. Masa berlaku surat rekomendasi yang hanya satu bulan serta keharusan memperbaruinya secara berkala dianggap sebagai hambatan yang membebani mereka.

Dari sisi sosial, kebijakan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan protes di kalangan masyarakat. Dalam analisis menggunakan teori anomie Robert K. Merton, ditemukan bahwa kebijakan ini menimbulkan kondisi ketidakseimbangan antara tujuan masyarakat dalam mendapatkan BBM untuk kebutuhan produktif dan sarana yang tersedia bagi mereka untuk mencapainya. Akibatnya, muncul bentuk adaptasi berupa pemberontakan, di mana masyarakat memilih untuk tidak lagi mengikuti aturan dan beralih ke alternatif lain seperti membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memicu kenaikan harga BBM di pasar gelap karena tingginya permintaan dari masyarakat yang tidak dapat memperoleh BBM secara resmi di SPBU. Hal ini meningkatkan beban biaya bagi para petani sawit yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Selain itu, keterbatasan akses BBM juga berdampak pada kelancaran proses panen dan distribusi hasil pertanian, yang berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU memiliki implikasi yang cukup luas dan menimbulkan reaksi yang cenderung negatif dari masyarakat. Meskipun tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengontrol distribusi BBM dan mencegah penyalahgunaan, dalam implementasinya kebijakan ini justru menimbulkan tantangan besar bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan revisi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya dengan memperpanjang masa berlaku surat rekomendasi atau menyediakan mekanisme alternatif yang lebih fleksibel bagi para petani dan pelaku usaha kecil yang memerlukan BBM untuk operasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Alvita Wagiswari D, P. R., Susilawati, I., & Witanti, A. (2023). Analisis Sentimen pada Komentar Aplikasi MyPertamina dengan Metode Multinomial Naive Bayes. *ForAI Journal: Informatics and Artificial Intelligence Journal*, 1(1), 10–19. <https://jurnal.forai.or.id/index.php/forai/article/view/4>

- Arbani, T. S. (2020). Penataan Perizinan Dan Status Perkebunan Tanpa Hak Guna Usaha Di. *El-Iqtishady*, 2(2), 97–110.
- Aziz, A. W. Al. (2019). *Optimasi distribusi bahan bakar minyak ke spbu menggunakan optimasi metaheuristik*.
- Berasa, C. K. (2023). *Kebutuhan bbm solar subsidi pada kapal perikanan di ppi lhok bengkuang kabupaten aceh selatan*.
- Bidin A. (2017). *Perilaku Konsumen* (Vol. 4, Issue 1).
- Brigade, V. R., & Kuning, U. L. (2023). *Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indone*. 22.
- Deannisa, S., Fauzi, A., Yulius Caesar, L. A., Sheshian, A., Mahdini, A., Arya, R. A., Hasanah, N., Azzahra Taramadina, N., Ning, A., & Widadari, A. (2023). *Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Menyesuaikan Harga dan Menjamin Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Nahasiswa Universitas Bina Nusantara* (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 564–570. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1507>
- Dewi, Y., S, S., Dini, A., M, M., & Mauli, R. (2022). *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi*. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320–326. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 66–79. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi Sumatera Barat.
- Ijaya, Y. A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Illegal Yoga Artha Ijaya 1) ; Yasarman 2) ; Anggawira 3)*. 2(3), 625–638.
- Karim, B. A. (2020). Teori Kepribadian dan Perbedaan Individu. *Education and Learning Journal*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.33096/eljour.v1i1.45>
- Laura A. King. (2010). *Psikologi umum : sebuah pandangan apresiatif* Laura A. King (p. 542).
- Masudara, N. A., & Saputera, A. R. A. (2020). Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3(2), 42–43.
- Muryani, E. (2012). *Zonasi Potensi Pencemaran Bahan Bakar Minyak terhadap Airtanah*. 4, 114–124.
- Nazir, M. (1998). *Jurnal metode Penelitina Kualitatif. Metode Penelitian*, 50–61.
- Permatasari, A. F., & Wijaya, M. (2018). Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18134>
- Ramdhani, E. C., Sapitri, J. E., & Rizkyansyah, M. (2018). Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Event Organizer Berbasis Web Pada PT. Adecon Jakarta. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 390–397.
- RI, D. (n.d.). *Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *Pengantar Sosiologi(Dasar Analisi, Teori, & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial,& kajian-kajian Strategi*.
- Sarbaini, S., & Nazaruddin, N. (2023). Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Laju Inflasi di

- Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 2(1), 25–32.
<https://doi.org/10.55826/tmit.v2i1.132>
- Sarjana, P. P., & Riau, U. I. (2019). *Tesis*.
- Sholihin, R. (2014). *Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*. 2(191), 184–199.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (P. D. Sugiyono (ed.); ke-27). ALFABETA, cv.
- Suryawardana, E., & Yani, T. E. (2017). Analisis Pengaruh Reputasi, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 258.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.490>
- Syahra, R. (2000). *Anomie di tengah perubahan sosial. Masyarakat Dan Budaya*, 3(1), 1–19.